

7 PEMDA DI PROVINSI BENGKULU RAIH PREDIKAT ZONA HIJAU PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Kamis, 25 April 2024 - bengkulu

Radarkoran.com - Sebanyak Tujuh pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu meraih predikat zona hijau dengan kualitas tertinggi untuk kepatuhan penyelenggara pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu.

Raihan tersebut disampaikan dalam kegiatan audiensi pertemuan Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan kegiatan Penyerahan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Perangkat Daerah dan RSUD yang berada di Zona Hijau, Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi dan Pelayanan Publik Kualitas Tinggi pada Selasa, 23 April 2024 di Balai Raya Semarak Bengkulu.

Dari hasil penilaian yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Kaur berada pada posisi pertama dengan nilai 95,94 dengan zona hijau Kategori A.

Lalu disusul Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nilai 94,08 poin dengan zona hijau Kategori A, lalu Kabupaten Lebong 92,00 dengan zona hijau Kategori A.

Kemudian Kabupaten Kepahiang dengan nilai 91,26 Zona hijau Kategori A, Kabupaten Mukomuko 90,02 dengan zona hijau Kategori A, Kabupaten Rejang Lebong 88,99 dengan zona hijau Kategori A dan Kabupaten Seluma 88,02 dengan zona hijau Kategori A.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Ombudsman Perwakilan Bengkulu, Jaka Andhika mengatakan, seluruh Pemda di wilayah Bengkulu baik Provinsi maupun 10 kabupaten/Kota telah masuk zona hijau.

"Selain 7 pemda yang meraih opini pelayanan publik kualitas tertinggi kategori A, namun ada 4 pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mendapatkan opini kualitas tinggi kategori B," kata Jaka, usai menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diterima langsung oleh Gubernur Bengkulu, Selasa 23 April 2024.

Untuk Pemda yang mendapatkan predikat zona hijau kategori B yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dengan mendapatkan nilai 87,05, mengalami peningkatan dari tahun 2022 lalu.

Kabupaten lainnya yang meraih zona hijau dengan kualitas tinggi dan kategori B adalah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nilai 84,88, Kota Bengkulu meraih nilai 84,20 dan Kabupaten Bengkulu Utara dengan nilai 79,14.

Jaka Andhika mengatakan terdapat 4 dimensi yang menjadi dasar penilaian, yakni dari sisi kompetensi penyelenggara publik yang ada, pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik, pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik serta indeks persepsi masyarakat atau pengguna layanan di instansi penyelenggaraan publik.

"Keempat itu yang kita lihat dan kita nilai apakah sudah sesuai dengan undang - undang nomor 25 tahun 2009 dan peraturan turunannya," sampai Jaka.

Menurut Jaka, dari keempat dimensi yang menjadi dasar penilaian kepatuhan pelayanan publik tersebut, hal yang menjadi fokus utama adalah indeks persepsi masyarakat yang menjadi pengguna layanan di instansi pelayanan publik. Apalagi di tengah era digital, keterbukaan informasi harus bisa dengan mudah diberikan kepada masyarakat.

"Ini yang penting, masyarakat pasti melihat. Masyarakat lebih kompleks dan komprehensif melihat pelayanan publik yang diberikan," ujar Jaka.

Diketahui, penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan sebagai salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dan mencegah terjadinya maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi, penyelenggara, serta pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik.

Dalam pemberian predikat, Ombusman RI mengelompokkan beberapa kategori yakni kategori penilaian predikat A dengan nilai 88-100 poin untuk opini kualitas tertinggi dengan zona hijau. Lalu kategori B dengan nilai 78-87,99 poin untuk opini kualitas tinggi dengan zona hijau.

Lalu ada kategori C dengan nilai 54 - 77,99 poin untuk opini kualitas sedang dengan zona kuning, kategori c dengan nilai 32 - 53,99 poin untuk opini kualitas rendah dengan zona merah. Serta ada kategori E dengan nilai 0 -31,99 opini kualitas terendah dengan zona merah.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA menyebut baik penilaian publik yang diberikan ombudsman RI Perwakilan Bengkulu. Ia menyebut, penilaian yang disampaikan lebih kepada kerangka sistematis, namun yang paling penting sejauh mana pelayanan publik bisa dirasakan masyarakat.

Untuk itu, Gubernur mengingatkan kepada seluruh jajarannya, terutama OPD teknis yang berhubungan dengan masyarakat agar dapat meningkatkan mutu pelayanannya dengan optimal.

"Kita minta kepada OPD untuk terus meningkatkan dan memperbaiki mutu layanan, sehingga kepuasan masyarakat bisa lebih baik," kata Gubernur.

Selain itu, berkaca dengan hasil penilaian yang ada, Gubernur juga menargetkan kualitas pelayanan publik pada tahun 2024 bisa lebih baik lagi dan bisa masuk dalam kategori A dengan kualitas tertinggi. Untuk itu, dirinya mengingatkan semua pihak akan pentingnya peningkatan pelayanan publik, karena salah satu yang mempengaruhi penilaian tersebut adalah kualitas layanan kepada masyarakat.

"Kedepannya bagaimana SDM kita untuk betul betul peduli dengan layanan masyarakat," singkat Gubernur.